

LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI SANGATTA

662987

 (0549) 23273
 JL. Prof DR. Wirjono Prodjodikoro,
 www.id.pn-sangatta.go.id

PENGADILAN NEGERI SANGATTA KELAS II

LAPORAN KEUANGAN

Untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Prof. Dr.Wirjono Prodjodikoro, S.H No. 01 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi

SANGATTA – KUTAI TIMUR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 232/PMK.05/2023 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sangatta, 23 Juli 2024
Kuasa Pengguna Anggaran,

Arini Widiastuti, S.IP.
NIP. 197409182006042001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	18
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	20
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	21
F. Pengungkapan Penting Lainnya	25
G. Lampiran Lampiran	28



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA**

Jl. Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH. No. 01
Kompleks Perkantoran Bukit Pelangi, Sangatta – Kutai Timur, Kalimantan Timur.
Telp. [0549] 23273 | Fax. [0549] 21324.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Periode Semester I yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sangatta, 23 Juli 2024

Kuasa Pengguna Anggaran,



Arini Widiastuti, S.IP.
NIP. 197409182006042001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II Periode Semester I Tahun Anggaran 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 16,842,500 atau mencapai 63 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp 26,902,000

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 77,973,000 atau mencapai 51 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 151.670.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024.

Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0 yang seluruhnya merupakan Aset Lancar.

Tidak Terdapat Nilai Kewajiban, utang yang belum ditagihkan, uang muka KPPN dan utang jangka pendek lainnya. Dan Ekuitas sebesar Rp 0.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp 16,842,500 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 84,301,102 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(67,458,602) Surplus Kegiatan Non Operasional sebesar 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(67,458,602)).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp 0 dikurangi Defisit-LO sebesar (67,458,602) kemudian ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 67,458,602 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp0

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 Juni 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
 ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
 SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662987

URAIAN			2024				2023			
			ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1			2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
I. Pendapatan Perpajakan			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Pajak Dalam Negeri			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Pajak Perdagangan Internasional			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak			26,902,000.	16,842,500.	(10,059,500.)	63	24,221,000.	17,184,500.	7,036,500.	71.
1. Pendapatan Sumber Daya Alam			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
3. Pendapatan BLU			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya			26,902,000.	16,842,500.	(10,059,500.)	63	24,221,000.	17,184,500.	7,036,500.	71.
III. Pendapatan Hibah			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)			26,902,000.	16,842,500.	(10,059,500.)	63	24,221,000.	17,184,500.	7,036,500.	71.
B. Belanja Negara			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
I. Belanja Pemerintah Pusat			151,670,000.	77,973,000.	(73,697,000.)	51	122,010,000.	47,907,500.	74,102,500.	39.
1. Belanja Pegawai			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Belanja Barang			151,670,000.	77,973,000.	(73,697,000.)	51	122,010,000.	47,907,500.	74,102,500.	39.
3. Belanja Modal			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
5. Belanja Subsidi			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
6. Belanja Hibah			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
7. Belanja Bantuan Sosial			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
8. Belanja Lain-lain			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
II. Transfer ke Daerah dan Dana			0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024

JUNa								
1. Transfer ke Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Perimbangan	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
1. Dana Transfer Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Bagi Hasil	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Alokasi Umum	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Dana Transfer Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
b. Dana Insentif Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
c. Dana Keistimewaan DIY	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
d. Dana Otonomi Khusus	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
2. Dana JUNa	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
3. Hibah Kepada Daerah	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	151,670,000.	77,973,000.	(73,697,000.)	51	122,010,000.	47,907,500.	74,102,500.	39.
C. PEMBIAYAAN	0.	0.	0.	0	0.	0.	0.	0.

II. NERACA

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 Juni 2024 dan 2023

(Dalam Rupiah)

NERACA

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN : (005) MAHKAMAH AGUNG
 NEGARA/LEMBAGA
 UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA)

NAMA PERKIRAAN			JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
				2023	Jumlah	%
1			2	3	4	5

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024

ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000.	0	10,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,864,497,235.	0	1,864,497,235	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	1,874,497,235.	0	1,874,497,235	0.00
JUMLAH ASET	1,874,497,235.	0	1,874,497,235	0.00
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,864,497,235.	0	1,864,497,235	0.00
Uang Muka dari KPPN	10,000,000.	0	10,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,874,497,235.	0	1,874,497,235	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN	1,874,497,235.	0	1,874,497,235	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,874,497,235	0	1,874,497,235	0.00

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN : (005) MAHKAMAH AGUNG
NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Penghasilan	0.	0.	0.	0.

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024

Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Cukai	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pajak Lainnya	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Masuk	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bea Keluar	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0.	0.	0.	0.
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Sumber Daya Alam	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	16,842,500.	17,184,500.	(342,000.)	(1.99)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	16,842,500.	17,184,500.	(342,000.)	(1.99)
PENDAPATAN HIBAH	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan Hibah	0.	0.	0.	0.
Jumlah Pendapatan	16,842,500.	17,184,500.	(342,000.)	(1.99)
BEBAN OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Beban Pegawai	0.	0.	0.	0.
Beban Persediaan	28,303,102.	22,093,653.	6,209,449.	28.105
Beban Barang dan Jasa	53,718,000.	25,303,000.	28,415,000.	112.299
Beban Pemeliharaan	0.	0.	0.	0.
Beban Perjalanan Dinas	2,280,000.	6,480,000.	(4,200,000.)	(64.815)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0.	0.	0.	0.
Beban Bunga	0.	0.	0.	0.
Beban Subsidi	0.	0.	0.	0.
Beban Hibah	0.	0.	0.	0.
Beban Bantuan Sosial	0.	0.	0.	0.
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0.	0.	0.	0.
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0.	0.	0.	0.
Beban Transfer	0.	0.	0.	0.
Beban Lain-Lain	0.	0.	0.	0.
JUMLAH BEBAN	84,301,102.	53,876,653.	30,424,449.	56.471

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(67,458,602.)	(36,692,153.)	(30,766,449.)	83.85
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0.	0.	0.	0.
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0.	0.	0.	0.
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(67,458,602.)	(36,692,153.)	(30,766,449.)	83.85
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
Beban Luar Biasa	0.	0.	0.	0.
POS LUAR BIASA	0.	0.	0.	0.
SURPLUS/DEFISIT - LO	(67,458,602.)	(36,692,153.)	(30,766,449.)	83.85

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA

: (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI

: (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI

: (1600) KALIMANTAN TIMUR

SATUAN KERJA

: (662987 PENGADILAN NEGERI SANGATTA
)

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0.	318,000.	(318,000.)	(100.)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(67,458,602.)	(36,692,153.)	(30,766,449.)	83.85
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0.	0.	0.	0.
PENYESUAIAN NILAI ASET	0.	0.	0.	0.
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0.	0.	0.	0.
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	67,458,602.	35,554,153.	31,904,449.	89.73
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0.	(1,138,000.)	1,138,000.	(100.)
EKUITAS AKHIR	0.	(820,000.)	820,000.	(100.)

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II

Dasar Hukum Pengadilan Negeri Sangatta merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan
Entitas dan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, sesuai Undang-undang Nomor 4
Rencana Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8
Strategis Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang bertugas menyelenggarakan
 peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
 Entitas berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Wirjonoprodjodikoro, SH No 01 –
 Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Kutai Timur , Kalimantan Timur.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Pengadilan Negeri Sangatta berkomitmen
 dengan visi Mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Dan Misi Pengadilan
 Negeri Sangatta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparan badan peradilan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
 2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim.
 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan.
 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- Meningkatnya kualitas pengawasan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Sangatta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Sangatta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Sangatta. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah sebagai berikut :

Pendapatan
-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan
-LO*

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan

dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap Aset Tetap

- Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum

kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Aset Lainnya***Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan penggunaan operasional entitas.

*Kewajiban***(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

*Ekuitas***(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Piutang Tak
Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

Penyusutan

(9) Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Triwulan tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Triwulan selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, pos-pos ekuitas pada neraca per 30 Juni 2014 yang berbasis *cash toward*

accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp16,842,500

B.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp16,842,500 atau 63 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp26,902,000. Pendapatan Pengadilan Negeri Sangatta seluruhnya merupakan Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, pendapatan ongkos perkara, pendapatan uang meja leges.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 30 Juni 2024

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	Rp26.902,000	16,482,500	63
Jumlah	Rp26.902.000	16,482,500	63

Realisasi pendapatan per 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 7 persen dibandingkan 30 Juni 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 Juni 2024	REALISASI 30 Juni 2023	NAIK (TURUN) Rp	NAIK (TURUN) %

Pendapatan Kejaksanaan dan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Uang Meja Leges.	16,842,500	17,184,500	(342,000)	8
Jumlah	16,842,500	17,184,500	342,000	8

B2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara Rp.
77,973,000

Realisasi belanja Pengadilan Negeri Sangatta per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp77,973,000 atau 51 persen dari anggaran belanja sebesar Rp151.670.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2024

Uraian	30 Juni 2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real. Angg.
Belanja Barang	151,670.000	77,973,000	51
Jumlah Belanja Kotor	151.670.000	77,973,000	51
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah	151.670.000	77,973,000	51

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024 dan Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 77.973.000 dan Rp47.907.500.

Belanja Barang
Rp77,973,000

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2024	REALISASI 30 JUN 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	77,973,000	47,907,500	12
Jumlah Belanja Barang	77,973,000	47,907,500	12

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara Pengeluaran
Rp10,000,000

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10,000,000 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATA 03 654446629871000	0	0
Uang Tunai	10,000,000	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	10,000,000	0

Kas di Bendahara Penerima
Rp0

C.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerima per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Saldo kas lainnya atau setara kas
Rp1,864,497,235

C.3. Saldo kas lainnya atau setara kas

Saldo kas lainnya atau setara kas per 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp1,864,497,235. Kas tersebut merupakan dana titipan pihak ketiga yang disimpan pada rekening RPL.

Rincian saldo kas lainnya atau setara kas

Keterangan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
RPL 046 PN SANGATA UTK PDT BIAYA PERKARA 0563-01-000742-30-7	1,864,497,235	0

Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	1,864,497,235	0

Persediaan Rp0.

C.4. Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

Persediaan	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Barang Konsumsi	0	0
Jumlah	0	0

Uang Muka dari
KPPN Rp
10,000,000

C.5. Uang Muka dari KPPN

TSaldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 sebesar Rp10,000,000. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

Ekuitas Rp0

C.6. Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

PNBP

Rp

16,842,500

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 36,808,500 dan Rp26,902,500.

Rincian Pendapatan

Per 30 Juni 2024 dan Juni 2023

Uraian	30 JUN 2024	30 JUN 2023
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	16,842,500	17,184,500
Jumlah	16,842,500	17,184,500

Beban

Persediaan

Rp

28,303,102

D.2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp28,303,102 dan Rp22,093,653. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan

Per 30 Juni 2024 dan Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2024	REALISASI 30 JUN 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan	28,303,102	22,093,653	28
Jumlah Beban Persediaan	28,303,102	22,093,653	28

Beban Barang

dan Jasa

Rp

53,718,000

D.3. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 53,718,000 dan Rp 25,303,000. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

Rincian Beban Barang dan Jasa

Per 30 Juni 2024 dan Juni 2023

URAIAN	REALISASI 30 JUN 2024	REALISASI 30 JUN 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Barang dan Jasa	53,718,000	25,303,000	112
Jumlah Beban Barang dan Jasa	53,718,000	25,303,000	112

Beban

Perjalanan Dinas

Rp 2,280,000

D.4. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp 2,280,000 dan Rp 6,480,000. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Per 30 Juni 2023 dan 2024

Uraian Jenis Beban	30 Juni 2024	30 Juni 2023
Beban Perjalanan Dinas	750,000	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,530,000	6,480,000
Jumlah	2,280,000	23,400,000

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Lainnya Rp0

D.5. Kegiatan Non Operasional Lainnya

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*Ekuitas Awal Rp0***E.1. Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp.318.000

*Defisit LO
(67,458,602)*

E.2. Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp67,458,602) dan (Rp. (Rp.36,692,153) Defisit LO merupakan selisih /kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, sampai dengan pos luar biasa.

E.3.

*Penyesuaian
Nilai Aset Rp0*

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk Periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

*Koreksi Nilai
Persediaan Rp0*

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 . Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Jumlah	0

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	0
Koreksi Nilai Saldo Awal	0
Jumlah	0

E.3.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp0

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Koreksi Lain-lain
Rp0

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-lain

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi Hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas Rp
67,458,602

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp67,458,602 dan Rp 35,554,153

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar Rp 16,842,500 sedangkan DKEL sebesar Rp 77,973,000

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp6.328.102 dan tidak terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Tidak terdapat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2024.

Ekuitas Akhir Rp0

E.5. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp (820,000)

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada Kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Triwulan lalu maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.3. INFORMASI AKRUAL

Tidak terdapat informasi akrual pada laporan keuangan per 30 Juni 2024

F.4. REKENING PEMERINTAH

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 654446629871000 a.n. BPG 046 PENGADILAN NEGERI SANGATTA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per

tanggal 30 Juni sebesar Rp0.

2. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangatta A/C 0563-000742-30-7 a.n. RPL 046 PN SANGATTA UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp1,984,392,235

F.5. REVISI DIPA

Hingga tanggal 30 Juni 2024, Pengadilan Negeri Sangatta Kelas II telah melakukan 1 kali revisi.

1. Revisi 1 pada tanggal 03 April 2024.

F.6. RALAT SPM, SP2D, SSBP DAN SSPB

Hingga tanggal 30 Juni 2024, Pengadilan Negeri Sangatta tidak ada melakukan Ralat SPM, SP2D, SSBP Dan SSPB.

F.7. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 55/PA/SK/XII/2023 Tanggal 1 Juni 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya Tahun Anggaran 2024, Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Staf Pengelola Keuangan pada Pengadilan Negeri Sangatta dan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Sangatta tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Arini Widiastuti, S.IP.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Arini Widiastuti, S.IP.
Pejabat Penguji SPP dan Penandatanganan SPM	: Muhamad Rodansa, S.I.P.
Bendahara Pengeluaran	: Yunita Padma

Bendahara Penerima

Dewi, A.Md.A.B.
: Aisyah, S.H., M.H.**F.8. PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2023 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kementerian/Lembaga Mahkamah Agung Republik Indonesia terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional VII – Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik nama PN) dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

NAMA SATKER	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	PAGU	REALISASI	%	SATUAN OUTPUT STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN OUTPUT STRATEGIS	%
PN Sangatta	Pembebasan Blaya Perkara	Rp670,000	0	0	1 Pkr	1 Pkr	0	0
PN Sangatta	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp.28,000,000	Rp.14,000,000	50	10 Orang	10 Orang	5	50

F.9. PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

Penyusunan belanja Pemerintah Pusat yang dirinci menurut fungsi dilakukan untuk melakukan analisis, yaitu mengetahui fungsi-fungsi mana yang menyerap alokasi anggaran paling banyak maupun sedikit. Berikut Capaian Rincian Output pada Pengadilan Negeri Sangatta Tahun Anggaran 2024:

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI SANGATA KELAS II TAHUN ANGGARAN 2024

Kementerian/Lembaga : Mahkamah Agung RI (005)
 Unit Organisasi : Dirjen Badilum (03)
 Satuan Kerja : (Pengadilan Negeri Sangatta (662987)
 Fungsi : Keterlibatan dan Keamanan (03)
 Sub Fungsi : Peradilan (03.04)
 Program : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (005.03.BF)
 Hasil Program : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (005.03.BF.1049)
 Lokasi : Kalimantan Timur (16)

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum								
	1. Percepatan Penyelesaian Perkara	1,500,000	750,000	50%	2	1	Kegiatan	50%	
	2. Perkara Pidana Yang Diselesaikan Ditingkat Wilayah Tengah	121,500,000	63,223,000	52.04%	403	244	Perkara	60%	
	3. Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum	28.000.000	14.000.000	50%	10	5	Orang	50%	
	4. Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara	670,000	0	0	1	0	Perkara	0	
	Subtotal	151,670,000	77,973,000	51,41%	416	250		60%	
	Penyesuaian (Revisi DIPA/Pengembalian Belanja/DII)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	
	Total	151,670,000	77,973,000	51,41%	416	250		60%	

G . lampiran lampiran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA

: 005
: 03
: 1600
: 662987

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 25/07/24 11:32 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum			0	50,000	50
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	100,000	50,000	0	50,000	
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	1,980,000	830,000	0	830,000	41.92
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	4,940,000	3,060,000	0	3,060,000	61.94
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	19,882,000	12,902,500	0	12,902,500	64.9
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	26,902,000	16,842,500	0	16,842,500	62.61
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	26,902,000	16,842,500	0	16,842,500	62.61
	JUMLAH PENDAPATAN	26,902,000	16,842,500	0	16,842,500	62.61

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
ESELON I
WILAYAH/PROVINSI
SATUAN KERJA
JENIS SATUAN KERJA

: 005
: 03
: 1600
: 662987
: KD

MAHKAMAH AGUNG
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
KALIMANTAN TIMUR
PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/07/24 11:31 AM
Halaman : 1
Prig ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 25/7/24 7:30 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
521	Belanja Barang Operasional							
52114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	840,000	7,585,000	1,038,000	0	1,038,000	13.68	6,547,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	840,000	7,585,000	1,038,000	0	1,038,000	13.68	6,547,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
52121	Belanja Bahan	65,670,000	65,670,000	38,680,000	0	38,680,000	58.9	26,990,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	65,670,000	65,670,000	38,680,000	0	38,680,000	58.9	26,990,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
52181	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	40,400,000	40,400,000	21,975,000	0	21,975,000	54.39	18,425,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	40,400,000	40,400,000	21,975,000	0	21,975,000	54.39	18,425,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	28,000,000	28,000,000	14,000,000	0	14,000,000	50	14,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	28,000,000	28,000,000	14,000,000	0	14,000,000	50	14,000,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,500,000	1,500,000	750,000	0	750,000	50	750,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15,260,000	8,515,000	1,530,000	0	1,530,000	17.97	6,985,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	16,760,000	10,015,000	2,280,000	0	2,280,000	22.77	7,735,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	151,670,000	151,670,000	77,973,000	0	77,973,000	51.41	73,697,000
	JUMLAH BELANJA	151,670,000	151,670,000	77,973,000	0	77,973,000	51.41	73,697,000

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 25/07/24 11:31 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	77,973,000
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	16,842,500	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	50,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	830,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	3,060,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	12,902,500
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,038,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	38,680,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21,975,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	14,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	750,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,530,000	0
JUMLAH			94,815,500	94,815,500

Keterangan :
FINAL

Kab. Kutai Timur, 25 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ARINI WIDIASTUTI
197409182006042001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 25/07/24 11:30 AM
Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	1,864,497,235	0
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	1,864,497,235
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	10,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	77,973,000
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	16,842,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	6,328,102
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	50,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	830,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	3,060,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	12,902,500
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,038,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	38,680,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultansi	14,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	750,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,530,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	28,303,102	0
JUMLAH			1,975,640,837	1,975,640,837

Keterangan :
FINAL

Kab. Kutai Timur, 25 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ARINI WIDIASTUTI
197409182006042001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 25/07/24 11:30 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	0	10,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	1,864,497,235	0	1,864,497,235	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	1,874,497,235	0	1,874,497,235	
JUMLAH ASET	1,874,497,235	0	1,874,497,235	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,864,497,235	0	1,864,497,235	0.00
Uang Muka dari KPPN	10,000,000	0	10,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,874,497,235	0	1,874,497,235	
JUMLAH KEWAJIBAN	1,874,497,235	0	1,874,497,235	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,874,497,235	0	1,874,497,235	

Keterangan :
FINAL

Kab. Kutai Timur, 25 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran


ARINI WIDIASTUTI
197409182006042001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662987

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 25/07/24 11:30 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	
			5	6			9	10
1	2	4			7	8		
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	26,902,000	16,842,500	(10,059,500)	63	24,221,000	17,184,500	7,036,500	71
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	26,902,000	16,842,500	(10,059,500)	63	24,221,000	17,184,500	7,036,500	71
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	26,902,000	16,842,500	(10,059,500)	63	24,221,000	17,184,500	7,036,500	71
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	151,670,000	77,973,000	(73,697,000)	51	122,010,000	47,907,500	74,102,500	39
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	151,670,000	77,973,000	(73,697,000)	51	122,010,000	47,907,500	74,102,500	39
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI SANGATTA 662987

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 25/07/24 11:30 AM
Halaman : 2
lap_irra_face_satker_new_poc

URAIAN	2024					2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	151,670,000	77,973,000	(73,697,000)	51	122,010,000	47,907,500	74,102,500	39	
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :
FINAL

Kab. Kutai Timur, 25 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran
ARINI WIDIASTUTI
197409182006042001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM
Tgl Cetak : 25/07/24 11:30 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	318,000	(318,000)	(100)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(67,458,602)	(36,692,153)	(30,766,449)	83.85
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	67,458,602	35,554,153	31,904,449	89.73
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	(1,138,000)	1,138,000	(100)
EKUITAS AKHIR	0	(820,000)	820,000	(100)

Keterangan :
FINAL

Kab. Kutai Timur, 25 Juli 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa Pengguna Anggaran

ARINI WIDIASTUTI
197409182006042001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 25/07/24 11:29 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	16,842,500	17,184,500	(342,000)	(1.99)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	16,842,500	17,184,500	(342,000)	(1.99)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	16,842,500	17,184,500	(342,000)	(1.99)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	28,303,102	22,093,653	6,209,449	28.105
Beban Barang dan Jasa	53,718,000	25,303,000	28,415,000	112.299
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	2,280,000	6,480,000	(4,200,000)	(64.815)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN KERJA : (662987) PENGADILAN NEGERI SANGATTA

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 25/07/24 11:29 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	84,301,102	53,876,653	30,424,449	56.471
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(67,458,602)	(36,692,153)	(30,766,449)	83.85
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(67,458,602)	(36,692,153)	(30,766,449)	83.85
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(67,458,602)	(36,692,153)	(30,766,449)	83.85

Keterangan :

FINAL

Kab. Kutai Timur, 25 Juli 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kuasa Pengguna Anggaran



ARINI WIDIASTUTI

197409182006042001



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 662987
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	151,670,000	151,670,000	0
2	Belanja	77,973,000	77,973,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	26,902,000	26,902,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	16,842,500	16,842,500	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	10,000,000	10,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	10,000,000	10,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JUL-24

